

Hajriyanto: Muhammadiyah Harus Bisa Menjadi "Ragi" Bagi Masyarakat

Sabtu, 12-03-2016

Yogyakarta -- Ketua PP Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari menandaskan warga Muhammadiyah harus bisa menjadi 'ragi' bagi masyarakat. Jumlah warga Muhammadiyah tidak perlu banyak-banyak, tetapi berkualitas baik dan bisa mewarnai kehidupan masyarakat.

Hajriyanto mengemukakan hal tersebut ketika menjadi keynote speaker pada rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan Tenaga Kependidikan (P4TK) Matematika Kemendikbud Jalan Kaliurang Yogyakarta, Jumat - Ahad (11-13/3/2016).

Rakernas ini dihadiri dari perwakilan 28 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) atau provinsi seluruh Indonesia. Lebih lanjut Hajriyanto mengatakan 'ragi' bisa mengubah benda yang ada di sekitarnya. "Ragi kalau dicampur dengan ketela makan akan menjadi tape, ragi yang dicampur dengan kedelai akan menjadi tempe. Bahkan bila ragi didekatkan dengan mangga maka mangga akan cepat masak," kata Hajriyanto yang juga mantan Wakil Ketua MPR RI.

Diakui Hajriyanto, Muhammadiyah merupakan Islam Kota dan tidak dikenal di desa-desa. Sehingga organisasi Muhammadiyah belum banyak yang menyentuh pedesaan. "Untuk tingkat pimpinan wilayah atau provinsi, Muhammadiyah bisa 100 persen. Tingkat pimpinan daerah atau kabupaten mencapai 70 persen. Sedang tingkat ranting atau kecamatan hanya 50 persen, dan tingkat desa sebesar 30 persen," kata Hajriyanto.

Menyadari hal ini, kata Hajriyanto, Muhammadiyah membentuk Lembaga Buruh Tani dan Nelayan (LBTN) tahun 2000. Tugas LBTN adalah menjadipenolong, pemecah persoalan masyarakat secara langsung. Kemudian lembaga ini disempurnakan menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang tugasnya memberdayakan masyarakat di tingkat pedesaan.

MPM telah berkiprah mendampingi 300 kelompok seluruh Indonesia. Diantaranya, mendampingi masyarakat Kokoda Papua, tukang becak, pengasong, petani, nelayan, peternak dan kaum difabel. Kini MPM telah ditetapkan menjadi salah satu trisula Muhammadiyah bersama Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Lingkungan Hidup (LH).

Sementara Ketua MPM PP Muhammadiyah, Dr M Nurul Yamin mengatakan Muktamar Muhammadiyah ke 47 Tahun 2015 telah menetapkan visi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Tahun 2020 adalah sebagai pilar strategis gerakan Muhammadiyah. Visi tersebut telah diterjemahkan dalam program strategis pemberdayaan dalam lima cluster komunitas masyarakat yaitu : petani, pelaku industri kecil dan menengah, kelompok difabel, buruh dan nelayan, dan komunitas miskin kota dan masyarakat pulau terluar.

Kata Yamin, untuk melakukan dampingan terhadap lima cluster masyarakat tersebut perlu ditopang penguatan MPM di beberapa lini. Di antaranya, kapasitas organisasi, sumberdaya manusia, jaringan dan kemitraan, media, dan advokasi terhadap kebijakan yg tidak berpihak pada kaum marjinal.

"Dalam rangka massifikasi program Majelis Pemberdayaan Masyarakat ke wilayah dan daerah secara nasional akan diselenggarakan Rapat Kerja Nasional pada tanggal 11-13 Maret 2016 di Yogyakarta dengan tema "Korupsi, Kemiskinan, dan Keberdayaan Ummat". Topik ini dipilih karena korupsi

mengakibatkan kaum marjinal semakin menderita dan diperlukan kekuatan nir-negara untuk melawan korupsi melalui kekuatan masyarakat itu sendiri,” kata Yamin.

Beberapa kegiatan yang menyertai Rakernas ini adalah Launching Gerakan Kembali Bertani dan Tanam Singkong Jenis Kingkong di Gunung Kidul pada 11 Maret 2016, Roundtable Discussion Korupsi, Kemiskinan dan Keberdayaan Ummat pada tanggal 10 Maret 2016 di Jakarta, dan Workshop Petani Pelopor Muhammadiyah pada 11-12 Maret 2016. (dzar)